



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21602 fax(0756)21502
E-mail : diknaspesirselt@yahoo.co.id / info@disdik.pesisirseltankab.go.id
website : <http://disdik.pesisir-selatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 420/08/DPK - SEKRETARIAT.01 /1/2019

PERUBAHAN PERTAMA
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/02/KPTS/BPT-PS/2019 tanggal 07 Januari 2019 dan perubahan pertama Nomor 900/43/KPTS/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 perlu ditentukan PPTK untuk kegiatan yang mengalami Perubahan tersebut.
- c. Bahwa penunjukan PPTK sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Berdasarkan usulan dari Sekretaris dan Kepala Bidang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. P
- e. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang Dri.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali **dirubah** terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Daerah kab Pesisir Selatan.
 11. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/KPTS /BPT-PS/2019, tanggal 07 Januari 2019 dan perubahan pertama Nomor 900/43/KPTS/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan nomor 420/01/DPK-Sekretariat/1/2019 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan organisasi Pengelola Kegiatan
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - f. Tugas-tugas lain yang diatur dalam Perpres Nomor 4 Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2015. yang merupakan perubahan dari Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketiga

- : Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keempat

- : Segala biaya yang timbul dengan di keluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan melalui kegiatan yang bersangkutan.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P A I N A N
PadaTanggal : 29 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

H. ZULKIFLI S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1005



R

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 420/08 /DPK - SEKRETARIAT/II/V/2019
 Tanggal : 29 Januari 2019
 Tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA / NIP	KEGIATAN YANG DIKELOLAH
1	DIAN FITRI, A.Md Nip. 19870517 201101 2 018	1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan pengjilidan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik / pemecahan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor 12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 13 Peningkatan Gedung Kantor 14 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15 Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawahan
2	HARLUS NIP. 19850105 198602 1 004	1 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 2 Penyediaan Jasa Publikasi 3 Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil SD
3	DONA DISMAYENI, A.Md NIP. 19830413 201407 2 003	1 Penilaian angka kredit tenaga pendidik 2 Sosialisasi juknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit guru 3 Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar
4	EDI SUMARTEN, SH NIP. 19800101 200701 1 006	1 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
5	NOFRIZAL, SH NIP. 19630116 198603 1 010	1 Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan
6	KARDIMAS Nip. 19650317 200012 1 001	1 Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah 2 Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD 3 Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP
7	IRVAN ABBAS, S.ST NIP. 19820919 200501 1 008	1 Penunjang Operasional Perencanaan dan pelaporan 2 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 3 Sosialisasi dan Updating data Pokok Pendidikan (Dapodik) 4 Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
8	MARDI M, M.Pd Nip.19610901 198202 1 003	1 Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar 2 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD

NO	NAMA / NIP		KEGIATAN YANG DIKELOLAH
		3	Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar
		4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
9	YENDRIZAL, S.Si		
	NIP. 19710515 199802 1 001	1	Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar
		2	Penyelenggaraan Akademi Komunitas
		3	Penyediaan Beasiswa Transisi
10	NOFRIZAL, ST		
	NIP. 19811127 201101 1 010	1	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
		2	Pembangunan Ruang ibadah
		3	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
		4	Pembangunan Pagar Sekolah SD
		5	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2019)
		6	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2019)
		7	Pengadaan Mebeleur Sekolah
		8	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah
		9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		10	Peningkatan Sarana/ Prasarana SKB (DAK Reguler)
		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11	WIKANDRA, ST		
	NIP. 19741128 200701 1 004	1	Pembangunan gedung sekolah SMP
		2	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP
		3	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP
		4	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah SMP
		5	Pembangunan Pagar Sekolah SMP
		6	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2019)
		7	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2019)
		8	Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMP (SMPN 7 Linggo Sari Baganti)
		9	Pengadaan Media Pendidikan SMP (komputer/laptop/proyektor)
		10	Pengadaan Komputer Ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Kompetensi Guru (UKG)
		11	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
12	SUDIRMAN, S.Pd,M.Pd		
	NIP. 19710924 199802 1 001	1	Lomba Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama
		2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pembelajaran Sekolah
13	NELFIANTI, S.Pd,		
	NIP. 19701227 199802 2 005	1	Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		2	Pelatihan Penyusunan Kurikulum
		3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Ujian Sekolah
		4	Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal SMP
14	RONI SUKRI, S.Pd		
	NIP. 19680909 199802 1 001	1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
		2	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik

NO	NAMA / NIP	KEGIATAN YANG DIKELOLAH	
		3	Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah
		4	Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar
		5	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
15	LENDRA, S.Pd. Nip.19760101 199811 1 001	1	Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS
		2	Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
		3	Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD
		4	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
		5	Rekrutmen dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SD dan SMP
16	ROSMADIANISMAR, SH NIP. 19680626 199009 2 001	1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
17	RAMLIY, SH NIP. 19630128 198602 1 013	1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
		2	Pelatihan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
		3	Hari Aksara Internasional (HAI)
		4	Pelatihan Pendidikan Keluarga
18	YUNISMA, SH NIP. 19651212 199203 2 002	1	Penyelenggaraan Paket C
		2	Pelaksanaan UNPK Paket B
		3	Pelaksanaan UNPK Paket C
		4	Pelatihan Tutor Paket C dan B
19	HELPI DA ERNI, S.Pd NIP. 19641229 198702 2 001	1	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
		2	Lomba Tingkat Pendidikan Anak usia Dini/ Taman Kanak-kanak
		3	Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan
		4	Pelatihan operator PAUD dan DIKMAS
		5	Sosialisasi DAK BOP PAUD
20	KASRIDA, SH NIP. 19631023 198602 2 001	1	Perawatan Cagar Budaya, Museum dan Peninggalan Bersejarah
		2	Lawatan Sejarah Kabupaten Pesisir Selatan
21	JUNI APRIL, S.Pd. MM Nip.19640409 198809 1 002	1	Pagelaran Seni dan Budaya D26
		2	Sumarak Pesisir Selatan
		3	Pembuatan Film Dokumenter, Dokudrama, Layar Lebar
22	FEBRIADI, SS NIP. 19820210 201001 1 034	1	Pelatihan Adat Bagi Pemangku Adat
		2	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan Budaya
		3	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal BAMK Berbasis ABS-SBK
		4	Pendokumentasian Secara Digital Atraksi Adat dan Budaya Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA/NIP		KEGIATAN YANG DIKELOLAH
23	YENERITA NIP. 19650410 198603 2 004	1	Fasilitasi dan Kegiatan Pendamping Festival Seni dan Budaya
		2	Paket Seni Tradisional dan Modern
		3	Pengiriman Tim Kesenian
		4	Pengadaan Peralatan Pendidikan Pada Bidang Kebudayaan

